

# PENDEKATAN EKONOMI DALAM POLITIK INTERNASIONAL

Setiyo Utomo

STIE Tribuana Bekasi

## ABSTRAK

Masalah ekonomi telah muncul dalam politik internasional sejak Revolusi Industri di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1880-an. Dalam periode ini masalah menciptakan pola hubungan konflik di antara negara-negara untuk menciptakan kompetisi untuk menaklukkan sumber daya ekonomi yang terletak di dalam atau di luar wilayah mereka. Sayangnya, itu menjadi kurang penting karena hubungan internasional telah didominasi oleh politik kekuasaan dan kepedulian militer sampai perang dunia pecah. Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, masalah ekonomi menjadi pendekatan sentral dalam politik internasional. Kehancuran pascaperang dan keruntuhan sosialisme-komunisme di Uni Soviet dan Cina mengakibatkan ekonomi dunia dalam hal kapitalisme liberal menjadi pemenangnya. Penguatan atau regionalisme ekonomi dan globalisasi telah menciptakan sejumlah lembaga ekonomi yang mengatur interaksi dan integrasi ekonomi nasional ke dalam regional dan global. Pola hubungan internasional lebih ditentukan oleh masalah ekonomi daripada politik atau ideologi. Meskipun, masalah ekonomi tidak hanya menjadi perpaduan antara negara-bangsa untuk bekerja sama tetapi juga sumber konflik untuk memperebutkan sumber ekonomi. Selain itu, globalisasi sebagai fondasi tatanan dunia telah menciptakan kesenjangan besar antara negara maju dan negara berkembang dan kurang berkembang, dan menciptakan kemiskinan internasional.

*Kata kunci: pendekatan ekonomi, politik internasional*

## PENDAHULUAN

Masalah ekonomi tidak terbatas pada pertukaran barang dan jasa, atau transaksi ekonomi lainnya antara satu negara dengan negara lainnya. Masalah ekonomi jauh lebih rumit dari sekedar masalah perdagangan. Meningkatnya interaksi antarnegara dan antarbangsa dalam bidang ekonomi menunjukkan

betapa pentingnya ekonomi dalam percaturan politik internasional. Ekonomi mempunyai sifat yang kompleks dalam pengertian bahwa ekonomi memiliki hubungan yang erat dan pengaruh yang kuat dalam bidang politik, baik yang berskala nasional, internasional maupun global.

Menurut John Zysman, “We have come into a divide. The economics changes we are watching will reshape the international security system. The fundamental shift of the power relations among nations.” (Kegley and Wittkopf, 1989). Hal ini mendukung peningkatan derajat signifikansi ekonomi dalam sistem keamanan internasional dan menyebabkan pergeseran mendasar dalam isu dalam hubungan internasional.

Tulisan berikut akan menjelaskan pergeseran pola interaksi dan paradigma dalam politik dan hubungan internasional, dan perkembangannya dalam politik internasional kontemporer.

Pergeseran Pola Interaksi dan Pendekatan dalam Politik Internasional: Munculnya Isu Ekonomi sekurang-kurangnya ada dua peristiwa besar di dunia yang mendorong munculnya isu ekonomi dalam perpolitikan global. Dua peristiwa tersebut adalah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin.

Sebenarnya, dimensi ekonomi telah muncul dalam politik internasional sejak terjadinya Revolusi Industri di Benua Eropa dan Amerika tahun 1830an dan 1850an. Selama revolusi berjalan,

interaksi ekonomi antar negara Eropa bukan bersifat kerja sama tetapi lebih mengarah pada persaingan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku bagi industri-industri militer mereka. Revolusi Industri menyebabkan terjadinya perlombaan senjata di Daratan Eropa yang mengakibatkan pecahnya Perang Dunia Pertama dan berlanjut hingga Perang Dunia Kedua. Selama dua kali perang besar tersebut, masalah ekonomi jauh tertinggal di belakang. Masalah politik kekuasaan dan kekuatan militer lebih mendominasi percaturan politik internasional saat itu.

Berakhirnya Perang Dunia Kedua membawa perubahan dalam pola interaksi antar negara dalam hubungan internasional. Pemupukan kekuatan militer selama perang berlangsung baik disadari maupun tidak telah menyerap alokasi sumber-sumber ekonomi yang sangat besar. Berakhirnya Perang Dunia Kedua ditandai dengan kehancuran ekonomi yang cukup parah bagi negara-negara yang terlibat perang. Keinginan untuk bangkit dan membangun kembali keutuhan wilayah ternyata tidak bisa terselesaikan hanya dengan pendekatan politik.

Daratan Eropa yang merupakan pusat politik internasional lumpuh total akibat perang ini. Kekalahan fasisme telah memporak-porandakan ekonomin Jerman dan Jepang. Begitu pula halnya dengan pihak Barat yang menjadi pemenang perang, kecuali Amerika Serikat, harus merasakan masalah kehancuran ekonomi politik yang sama. Inggris harus kehilangan dominasinya dalam politik internasional dan harus mengakui kemunculan Amerika Serikat sebagai super power baru dalam politik internasional.

Disinilah titik awal semakin mengglobalnya permasalahan ekonomi dalam politik internasional. Selama periode Perang Dunia Kedua, dalam pertemuan di New Jersey tahun 1943 dibentuk suatu sistem yang merancang pelaksanaan liberalisasi perdagangan antar negara, yang dikenal dengan Bretton Woods System. Sistem ini dilengkapi dengan alat tukar internasional yang disebut dengan Special Drawing Rights (SDR). Akan tetapi krisis ekonomi 1970an menyebabkan sistem ini tidak populer dan hampir seluruh negara di dunia terutama Amerika Serikat dan negara-

negara Eropa Barat kembali menjadi proteksionis.

Di Eropa sendiri, upaya pemulihan ekonomi pasca perang membangkitkan semangat persatuan untuk menjalin kerjasama ekonomi. Ide kerja sama ekonomi yang digagas oleh Presiden Perancis de Gaulle dan Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schuman diwujudkan dalam pembentukan Komunitas Besi dan Baja Eropa (European Coal and Steel Community / ECSC) dalam Traktat Paris tahun 1951. Dalam komunitas ini, Perancis berhasil menyatukan negaranya bersama dengan Jerman Barat, Italia, Belanda, Belgia dan Luxemburg dalam Pasar Bebas Besi dan Baja.

Upaya pembangunan ekonomi seusai Perang Dunia Kedua kembali tenggelam ketika Uni Soviet berhasil membangun kembali negaranya yang hancur dalam Perang Dunia Kedua. Kebangkitan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya berhasil menyaingi kekuatan Amerika Serikat yang pada saat itu menjadi negara adi kuasa tunggal dengan ideologi liberal kapitalisnya. Kekhawatiran Amerika Serikat akan menyebarnya pengaruh Komunisme

Soviet ke Eropa Barat mengharuskan Amerika Serikat merangkul negara-negara tersebut untuk bersama-sama membendung menyebarnya pengaruh komunisme. Melalui containment policy pada masa Presiden Harry S. Truman, Amerika Serikat berusaha menghadapi penyebaran komunisme di Eropa melalui dua cara, yaitu pembendungan di bidang ekonomi melalui Marshall Aid (1946) yang bertujuan membantu pemulihan ekonomi negara-negara Eropa Barat; dan pembendungan di bidang politik keamanan dengan membentuk pakta pertahanan North Atlantic Treaty Organization (NATO) tahun 1947 yang bertujuan menangkal komunis dengan kekuatan militer.

Pertentangan dan perebutan wilayah pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet ini menimbulkan Perang Dingin dalam politik internasional. Selama Perang Dingin berlangsung, dunia selalu diwarnai pertentangan ideologi antar dua kutub, yaitu Barat (liberalisme) dan Timur (komunisme). Persaingan memperluas wilayah pengaruh ideologi ke seluruh penjuru dunia yang disertai dengan peningkatan

kekuatan militer dengan menggunakan senjata nuklir oleh kedua blok berakhir dengan runtuhnya komunisme Soviet sebagai aktor utama blok Timur tahun 1992.

Berakhirnya Perang Dingin memperlihatkan kenyataan bahwa konflik ideologi tidak lagi relevan dalam politik internasional. Isu sentral yang muncul

kemudian adalah persoalan-persoalan ekonomi yang muncul seiring dengan meningkatnya interdependensi global antar negara dan regionalisme ekonomi. Hampir di setiap belahan bumi terdapat blok ekonomi yang menyebutkan identitas regionalnya seperti European Economic Community (EEC), Latin America Free Trade Area (LAFTA), North America Free Trade Area (NAFTA), Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), dan lain-lain. Di samping itu dibentuk pula organisasi atau lembaga internasional baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi untuk mengatur jalannya sistem perekonomian global tersebut, yaitu: World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), International

Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Organization Petroleum Exporting Countries (OPEC), Organization for Economic and Development (OECD), dan lain-lain.

Menurut John Mersheimer, pola pergeseran konflik dan kerjasama politik yang didorong faktor ideologi selama Perang Dingin ke arah kerja sama dan konflik ekonomi pasca Perang Dingin bukanlah suatu yang sederhana. Keberhasilan kerjasama ekonomi dari sistem internasional yang kapitalis dan mengutamakan pemerintahan yang demokratis di negara-negara Barat yang telah diraih pasca Perang Dingin tidak lepas dari adanya common threat (ancaman bersama), yaitu ancaman komunisme selama 45 tahun dalam era Perang Dingin. Lenyapnya faktor ancaman bersama akan memperlihatkan kelemahan perkembangan dan kerja sama ekonomi yang ada, termasuk penanganan keterkaitan independensi ekonomi yang menjadi gejala utama di hampir setiap kawasan dunia (Djafar, 1996: 36).

Salah satu indikasi yang dapat dijadikan tolok ukur bahwa telah terjadi pergeseran dari paradigma ideologi

politik sebelum dan dalam periode Perang Dingin ke paradigma ekonomi adalah pertumbuhan-pertumbuhan blok-blok regional. Sampai dengan Perang Dingin, blok-blok yang bermunculan lebih bersifat kerja sama militer dan didasarkan pada ideologi, seperti NATO (1948), Pakta Warsawa (1955), Pakta Baghdad (1967), ANZUS (1951), dan sebagainya. Sedangkan pasca Perang Dingin, muncul blok-blok ekonomi dan perdagangan seperti APEC (1989), NAFTA (1992), Uni Eropa (1992), dan AFTA (1992, efektif berlaku 2010).

Pergeseran dari pendekatan ideologi ke pendekatan ekonomi membawa implikasi lebih lanjut. Meningkatnya interaksi ekonomi antarbangsa dalam bentuk perdagangan internasional memunculkan aktor-aktor non- negara seperti perusahaan multi nasional (Multi National Corporations/MNCs). Keberadaan aktor-aktor non-negara ini secara perlahan telah menggantikan peran utama negara sebagai aktor dominan dalam politik dan hubungan internasional sehingga terjadi perubahan dari state power era menjadi non- state era.

## Perkembangan Pendekatan Ekonomi dalam Politik Internasional

Politik Internasional sampai dengan tahun 1990an masih didominasi oleh isu ekonomi. Interaksi antar bangsa baik dalam bentuk kerjasama maupun konflik lebih banyak didasarkan atas alasan ekonomi daripada politik. Pendekatan ekonomi sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pendekatan politik sehingga muncul pendekatan baru dalam politik internasional yaitu pendekatan ekonomi politik.

Pendekatan ekonomi politik ini menjelaskan hubungan timbal balik antara hubungan ekonomi dan politik, yang tergambar dalam hubungan pasar dan negara. Di satu pihak, politik menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan; dan penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk sangat menentukan hakikat sistem ekonomi. Di pihak lain, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Ekonomi membentuk hubungan kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya hal ini akan merombak sistem politik sekaligus membentuk

struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional jaman modern pada intinya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik (Jones, 1993: 223-224). Misalnya, semakin sering embargo ekonomi diberlakukan dengan alasan politis dan tidak jarang pula kebijakan politik dikeluarkan dengan alasan ekonomi. Amerika Serikat yang memberlakukan embargo ekonomi terhadap Libya, Iran dan Irak lebih didasarkan pada alasan politis daripada alasan ekonomi, ketika pemimpin di negara-negara ini menentang keberadaan dan dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sebaliknya, kelompok bisnis Jepang mampu menekan pemerintahnya dan LDP sebagai partai yang berkuasa untuk mengeluarkan kebijakan politik yang mengharuskan penyelesaian kasus mobil nasional dengan Indonesia melalui forum WTO. Contoh lain adalah bagaimana krisis ekonomi di Asia sangat berimbas pada perpolitikan domestik negara-negaranya. Di Indonesia, krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan telah menumbangkan

pemerintah yang berkuasa lebih dari 30 tahun.

Meskipun ada hubungan timbal balik antara politik dan ekonomi, faktor ekonomi memperlihatkan dominasinya atas faktor politik. Hubungan internasional antara Barat – Timur, Utara – Selatan, negara-negara maju – negara-negara berkembang – negara-negara miskin, semuanya lebih didasarkan pada alasan ekonomi. Ekonomi telah menjadi kunci status dan peringkat negara-bangsa dalam sistem global. Terdapat tanda-tanda pembagian, ada yang berdasarkan letak geografis dan ada yang berdasarkan kapasitas ekonomi nasionalnya.

JP. Pronk, menjelaskan bahwa negara-negara di dunia termasuk ke dalam 3 kategori, yaitu front runners (pelari cepat), intermediate space

(perantara) dan stragglers (ketinggalan). Front runners adalah negara-negara dengan ekonomi yang ditandai oleh taraf tinggi inovasi teknis dalam produk maupun proses produksi dan dalam metode organisasi yang lebih baik untuk produksi, distribusi maupun pemasaran. Intermediate space adalah negara-negara

yang perekonomiannya tidak pasti dalam posisi memimpin, akan tetapi dalam beberapa sektor relatif mempunyai keuntungan supaya sedikit banyak dapat mengikuti front runners dan bahkan memperoleh manfaat dari kegiatan mereka. Stragglers adalah negara-negara dengan ekonomi yang tidak dapat mengikuti kecepatan yang lain (Pronk, 1993: 76).

Memasuki tahun 1990-an, ada tiga kutub ekonomi yang paling menonjol yaitu Amerika Serikat dan Kanada, Jepang dan Uni Eropa. Dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki ketiga negara ini maka mereka berada pada posisi yang menguntungkan dalam politik internasional. Mereka mempunyai posisi tawar menawar yang tinggi terhadap lawannya, mempunyai suara dan pengaruh dominan di forum internasional, dan menjadikan lembaga-lembaga universal seperti PBB, WTO dan IMF sebagai kepanjangan tangan mereka dalam rangka pengejaran kepentingan ekonomi nasional, termasuk untuk mengeksploitasi negara-negara miskin. Selain itu, mereka menjadi fungsi politik internasional yang dapat mengarahkan politik internasional

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Jepang merupakan contoh ideal dari argumen ini. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mengharuskan Jepang memenuhi keinginan Amerika Serikat untuk jangka waktu tertentu, terutama yang berhubungan dengan kekuatan militer Jepang. Bahkan pembuatan Konstitusi Jepang 1947 tidak terlepas dari campur tangan Amerika Serikat. Akan tetapi keberhasilan ekonomi yang diraih Jepang membawa posisinya sejajar dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Dengan kemajuan ekonominya, Jepang tumbuh menjadi negara industri maju di dunia dan menjadi mitra dagang utama bagi Amerika Serikat, Uni Eropa dan Asia.

Keberhasilan yang diraih Uni Eropa juga merupakan suatu bukti dominasi paradigma ekonomi dalam politik dan hubungan internasional. Penyatuan negara-negara Eropa Barat yang sekarang berjalan ke arah unifikasi dengan Eropa Timur sangat mempengaruhi ekonomi politik internasional. Kerjasama ekonomi Eropa yang sampai pada tahap totally economic

integration telah berimbas pada bidang politik dan pembentukan Common Foreign and Security Policy yang berarti Uni Eropa telah mencapai tahap integrasi politik. Tren integrasi Eropa ini ternyata semakin memperkuat regionalisme yang telah tumbuh sejak tahun 1980-an di seluruh kawasan di dunia. Kerjasama antar bangsa tidak lagi bersifat bilateral atau multilateral tetapi perlahan beralih pada bentuk minilateral yaitu kerjasama antar blok perdagangan regional seperti Uni Eropa – ASEAN, Uni Eropa – Africa Caribbean Pasifik, Uni Eropa – NAFTA, NAFTA – LAFTA, dan sebagainya.

Akan tetapi, yang sangat disayangkan dalam interaksi ekonomi internasional ini adalah ketidakseimbangan antara Utara dan Selatan. Negara-negara miskin yang secara geografis berada di belahan bumi selatan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap negara-negara maju yang berada di belahan bumi utara. Dalam sistem kapitalisme yang diciptakan negara-negara Utara, negara-negara Selatan diletakkan pada posisi yang tidak diuntungkan. Akibatnya, penetrasi

ekonomi negara-negara Utara terhadap negara-negara Selatan sering kali terjadi.

Meskipun di era 1990-an, isu ekonomi sering menjadi isu perekat hubungan antar negara, tidak jarang juga menjadi sumber konflik. Regionalisme yang bersifat protektif dalam rangka melindungi pasar internalnya terhadap pasar global sering kali merugikan negara yang menjadi mitra dagangnya. Ketika Pasar Tunggal Eropa terbentuk 1993, Amerika Serikat dan Jepang sangat dirugikan karena ada banyak hambatan untuk mengeksport barangnya ke pasar Eropa. Semakin banyaknya trade diversion (pengalihan negara impor) oleh Uni Eropa juga telah merugikan negara-negara ASEAN. Banyaknya konflik dagang yang terjadi antar negara mengharuskan diciptakannya perangkat internasional yang mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan dalam perdagangan global.

Selain itu, perebutan sumber-sumber ekonomi yang langka dan terbatas menyebabkan munculnya persaingan perluasan wilayah pengaruh antar kekuatan-kekuatan besar dunia, seperti yang terjadi di Timur Tengah dan

Asia Tengah antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina yang terjadi sejak awal tahun 2000-an (PRI, 2012).

Awal tahun 2000-an, isu ekonomi tidak hanya muncul untuk melandasi kerjasama ekonomi perdagangan atau sumber konflik antar negara-bangsa tetapi juga dalam masalah kesenjangan pembangunan sebagai akibat globalisasi ekonomi yang berbentuk kemiskinan internasional. Di satu pihak, masuknya Cina dan Rusia menjadi anggota WTO pada Desember 2001 dan Agustus 2012 merupakan peristiwa penting dalam politik internasional dan tata dunia kontemporer. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa kejayaan perjalanan panjang kapitalisme yang berhasil melumpuhkan dua kekuatan ekonomi sosialis terbesar di dunia. Ketergantungan ekonomi Cina dan Rusia dengan ekonomi global menyebabkan egoisme ideologi politik dikalahkan dengan kebutuhan ekonomi nasional untuk mencari modal dan perluasan pasar. Kebijakan ekonomi Cina mengalami evolusi dramatis dari Komunisme Maois menjadi kapitalis, dan menjadikan Cina sebagai economic

superpower dan menjadi negara pesaing Amerika Serikat (Mansbach and Rafferty, 2008: 568). Begitu pula halnya dengan Rusia sejak kemerdekaannya tahun 1992. Negara ini berusaha membangun perekonomiannya ke arah kapitalisme setelah menjadi pewaris Uni Soviet yang menjalankan kebijakan ekonomi Sosialisme Lenin dan Stalin.

Di pihak yang lain, masih dalam konteks saling ketergantungan ekonomi global, kemiskinan muncul di negara-negara yang tidak mampu bersaing dalam liberalisasi perdagangan internasional. Meskipun ada upaya negara-negara maju baik secara bilateral maupun multilateral atau melalui organisasi internasional seperti IBRD, IMF, dan lembaga-lembaga PBB lainnya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketertinggalan di negara-negara berkembang dan miskin seperti di Asia Selatan, Amerika Latin dan Selatan, Afrika dan Eropa Timur, pengintegrasian perekonomian mereka ke dalam ekonomi global terus menggerus kedaulatan ekonominya sehingga yang terjadi adalah kemiskinan yang tanpa ujung, dan memberi warna baru dalam masalah keamanan manusia.

## **PENUTUP**

Meningkatnya saling ketergantungan global di bidang ekonomi setelah Perang Dunia Kedua dan regionalisme ekonomi menjelang dan pasca berakhirnya Perang Dingin memunculkan ekonomi menjadi isu sentral yang mewarnai dan mendominasi interaksi antar negara bangsa. Pemaparan beberapa peristiwa di atas menjadi suatu pembenaran bahwa hanya negara-negara yang mempunyai kemampuan ekonomi yang besar mempunyai akses ke dalam politik internasional, baik dalam menentukan maupun memainkannya. Penguasaan mekanisme perekonomian global di bawah kekuasaan negara-negara Barat telah melahirkan dan melestarikan tata ekonomi dunia kapitalis, terutama ketika dua kekuatan sosialis dunia jatuh dan beralih ke arah kapitalisme.

Pendekatan ekonomi telah menentukan pola interaksi dalam politik internasional, baik kerjasama maupun konflik. Bahkan, konflik yang muncul tidak hanya bermotif persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi yang penting tetapi juga konflik

akibat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi global antara negara-negara maju dengan negara berkembang dan miskin yang menjadi bukti nyata dampak negatif dari globalisasi ekonomi.

Dalam perkembangannya, pendekatan ekonomi dalam banyak hal lebih mampu menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hubungan internasional dibandingkan pendekatan politik, meskipun keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kerjasama di bidang ekonomi lebih dapat bertahan dari pada kerja sama politik. Keberhasilan kerjasama dan konflik ekonomi terbukti berimbas pada bidang politik, tetapi kerjasama dan konflik politik sulit memberikan bukti nyata memberi imbasan ke dalam bidang ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djafar Zainuddin. 1996. Teori Hubungan Internasional Memerlukan Paradigma Baru?. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Jones, Walter S. 1993. Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatanan Dunia. Jakarta.
- Kegley, Charles W. and Eugene R. Wittkopf. 1989. World Politics: Trend and Transformation. The Transformation of the Political Economy: Perspective from the First World. 3<sup>rd</sup> edition. New York: MacMillan.
- Mansbach, Richard W., and Kristen L. Rafferty. 2008. Introduction to Global Politics. New York: Routledge.
- Pronk, JP. 1993. Sedunia Perbedaan: Sebuah Acuan Baru dalam Kerjasama Pembangunan Tahun 1990-an. Batas-batas yang Memudar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Public Radio International. 2012. World Power Battle for Influence over Central Asia. Terdapat di [www.pri.org/stories/world/asia/tt-world-powers-battle-for-influence-over-central-asia-10888.htm](http://www.pri.org/stories/world/asia/tt-world-powers-battle-for-influence-over-central-asia-10888.htm). diakses tanggal 9 Maret 2013.

